

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Perangkat Desa, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Tabanan

Ni Ketut Muliati¹
Ni Putu Yeni Yuliantari²
Ni Komang Dian Sugiantari³

^{1,2,3}Universitas Hindu Indonesia; Surel : Ketutmuli@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to determine whether or not village officials in Tabanan Regency are held to account for their handling of village funds, and whether or not villagers have easy access to financial statements. In this investigation, a questionnaire served as the primary method of data collection from the study's respondents. This study surveyed 96 locals at the Tabanan Regency Village Office. Purposive sampling is a method used to determine a sample. The study found that the accountability of managing village funds was significantly affected by the competence of human resources. The accountability of managing village funds is significantly impacted by the role of village officials. Accountability in the administration of village funds is greatly impacted by public access to financial reports.

Keyword: *Human Resource Competence, Accountability of Village Fund Management*

PENDAHULUAN

Desa masuk kedalam sistem pemerintahan dimana berkedudukan sebagai mitra pemerintah untuk mengemban tugas mensejahterakan masyarakat. Dalam UU tahun 2014 Nomor 6 bisa kita ambil kesimpulan bawasannya desa memiliki sebuah kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan seda, mengadakan berbagai pembangunan desa dan melakukan berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang nantinya seluruh kegiatan tersebut akan diberikan dana oleh pemerintah berupa alokasi dana desa. Dengan adanya alokasi dana kepada desa maka diperlukan sebuah tata kelola yang baik dalam proses pengelolaannya. Salah satu unsur utama untuk mencapai tata kelola dana desa yang baik adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas bisa diisitilahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemimpin atau seseorang yang melakukan tindakan kepada mereka yang membutuhkan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa akan menitikberatkan pada upaya pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas masyarakat, namun khususnya penggunaan dana desa. Akuntabilitas merupakan wujud ilustrasi dari berjalannya kegiatan pemerintah desa dengan baik dan

benar. Dalam pemerintah desa, akuntabilitas akan menyangkut tentang kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dalam upaya memberikan pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan kepada masyarakat khususnya dalam penggunaan dana desa. Akuntabilitas merupakan wujud ilustrasi dari berjalannya kegiatan pemerintah desa dengan baik dan benar. Akuntabilitas akan menyangkut tentang berbagai bentuk pertanggungjawaban, berbagai wujud penyajian serta kegiatan pelaporan, maupun berbagai bentuk pengungkapan atas semua kegiatan pemerintah desa kepada masyarakatnya. Akuntabilitas menjadi begitu penting untuk dijadikan dasar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya dalam upaya pengelolaan dana desa.

Beberapa faktor, termasuk keterampilan sumber daya manusia yang tersedia, berkontribusi pada aktualisasi akuntabilitas. Kompetensi sumber daya manusia akan terkait dengan setiap aspek potensi individu sebagai karyawan dan sebagai orang yang berprestasi. Kompetensi sumber daya manusia akan berkaitan dengan seluruh kemampuan serta kapasitas seseorang dalam bekerja dan mencapai sebuah tujuan. Hal inilah yang menyebabkan kompetensi sumber daya manusia menjadi point penting yang sangat diperhatikan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, keahlian SDM merupakan faktor kunci untuk dipertimbangkan ketika mencoba mencapai tujuan bisnis. Temuan penelitian (Umaira & Adnan, 2019) menguatkan teori tersebut dengan alasan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten sangat penting untuk membangun akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun temuan ini bertentangan dengan (Anggraeni, 2019) yang tidak menemukan korelasi antara kompetensi sumber daya manusia dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Peran perangkat desa merupakan sebuah perwujudan tanggungjawab yang diberikan kepada pihak aparatur desa untuk bisa membantu kepala desa dalam membentuk kewajiban dan merancang berbagai hal yang ada didalam ruang lingkup pemerintahan desa dan turut berpartisipasi secara penuh untuk membantu kepala desa menjalankan berbagai kebijakan yang telah disusun. Perangkat desa tentunya memiliki peran untuk bisa mengelola keseluruhan sumber daya yang ada didesa secara baik dan bijaksana. Hal ini dikung oleh temuan dari (Dwiyanti & Hidajat, 2022) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas yang baik bisa terwujud jika peran perangkat desa bisa dijalankan dengan baik dan benar. Tetapi (Anggraeni, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas tidak dapat dipengaruhi oleh faktor peran perangkat desa.

Aksesibilitas terhadap laporan keuangan juga merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudahan memperoleh informasi tentang laporan keuangan inilah yang kami maksud dengan aksesibilitas. Penelitian oleh (Indriasih et al., 2022) menegaskan bahwa ketersediaan laporan keuangan memberikan pengaruh yang menguntungkan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Petarukan karena lebih banyak masyarakat yang dapat melihat bagaimana dana tersebut digunakan. Namun seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Puspa et al. (2020), ketersediaan laporan keuangan tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab pengelolaan dana desa.

Kabupaten Tabanan kembali meraih kesuksesan di tingkat nasional, cukup meningkatkan keterampilan manajemen Dana Desa pada tahun 2021 untuk menempati posisi ketiga di negara ini. Mendapat pengakuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DjPb) Kementerian Keuangan RI atas usahanya. Hal ini menunjukkan dedikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Dana Desa harus dikelola dengan baik agar penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kabarnasa, 2022. Adanya ketidakkonsistenan atas hasil penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian kembali untuk mengetahui factor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada pada pemerintahan desa Se-Kecamatan Tabanan.

Teori penatagunaan juga memberikan kepercayaan pada temuan ini. Teori kepengurusan, seperti yang dijelaskan oleh Donaldson dan Davis (1991), berpendapat bahwa manajer harus menempatkan kepentingan organisasi di atas ambisi pribadi mereka sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau pihak lain yang bertanggung jawab atas nama mereka yang membutuhkan pertanggungjawaban adalah contoh pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa akan menitikberatkan pada upaya pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas masyarakat, namun khususnya penggunaan dana desa. Akuntabilitas merupakan wujud ilustrasi dari berjalannya kegiatan pemerintah desa dengan baik dan benar.

Kompetensi sumber daya manusia akan berkaitan dengan seluruh kemampuan serta kapasitas seseorang dalam bekerja dan mencapai sebuah tujuan. Hal inilah yang

menyebabkan kompetensi sumber daya manusia menjadi point penting yang sangat diperhatikan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan.

Peran perangkat desa merupakan sebuah perwujudan tanggungjawab yang diberikan kepada pihak aparat desa untuk bisa membantu kepala desa dalam membentuk kewajiban dan merancang berbagai hal yang ada didalam ruang lingkup pemerintahan desa dan turut berpartisipasi secara penuh untuk membantu kepala desa menjalankan berbagai kebijakan yang telah disusun. Aksesibilitas terhadap laporan keuangan juga merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudahan memperoleh informasi tentang laporan keuangan inilah yang kami maksud dengan aksesibilitas.

Kompetensi sumber daya manusia akan terkait dengan setiap aspek potensi individu sebagai karyawan dan sebagai orang yang berprestasi. Oleh karena itu, keahlian SDM merupakan faktor kunci untuk dipertimbangkan ketika mencoba mencapai tujuan bisnis. Temuan penelitian (Umaira & Adnan, 2019) menguatkan teori tersebut dengan alasan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten sangat penting untuk membangun akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun temuan ini bertentangan dengan (Anggraeni, 2019) yang tidak menemukan korelasi antara kompetensi sumber daya manusia dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

H₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Aparat di desa bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada kepala desa dalam menyusun kebijakan dan rencana baru, dan untuk mendukung kepala desa dalam melaksanakan kebijakan dan rencana tersebut. Aparat di desa, seperti bendahara, diharapkan melakukan tugasnya dengan benar dan jujur sambil menghindari segala bentuk penipuan. Pemerintah daerah harus dapat dengan mudah dan efektif mengelola dan mengolah sumber daya desa. Akuntabilitas yang baik bisa terwujud jika peran perangkat desa bisa dijalankan dengan baik dan benar (Dwiyanti & Hidajat, 2022). Tetapi (Anggraeni, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas tidak dapat dipengaruhi oleh faktor peran perangkat desa.

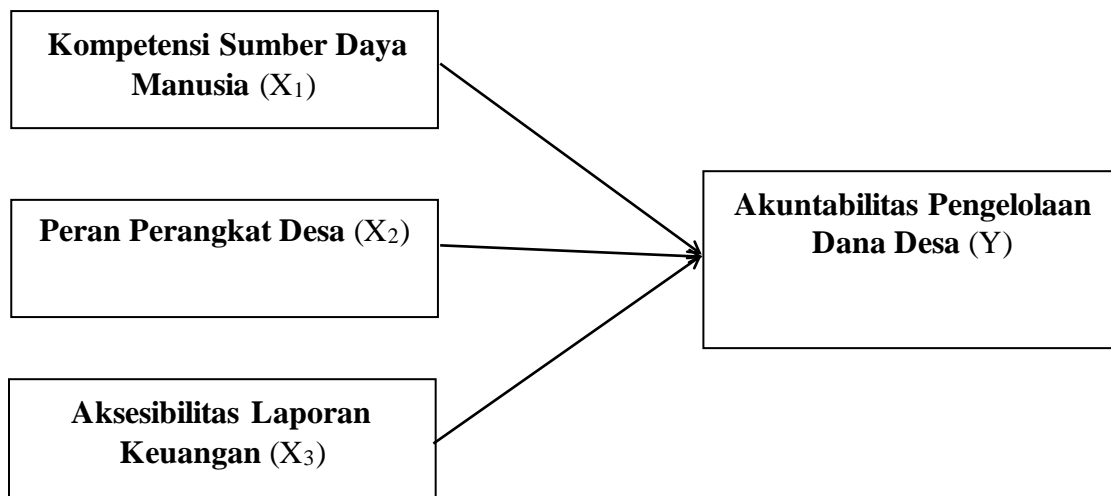
H₂ : Peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Aksesibilitas mengacu pada kemudahan pengguna laporan keuangan (seperti pemerintah) untuk memperoleh informasi. Laporan pertanggungjawaban dan laporan observasi yang dapat dibaca dan dipahami oleh publik merupakan standar emas untuk mengukur efektivitas akuntabilitas. Aksesibilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban publik secara terbuka dan jujur dalam penyajian laporan keuangan pemerintah Setiawan dkk (2015). Menurut Destiana (2018) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₃ : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian dengan pendekatan kuantitatif asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan dilakukan di 12 Kantor Desa Se-Kecamatan Tabanan dengan jumlah populasi sebanyak 193 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan metode *Purposive sampling*. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 responden. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya Uji SPSS yang terdiri dari Uji Validitas dan Reabilitas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Analisis Regresi Linier Berganda serta pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta penelitian disurvei dengan mengirimkan kuesioner. Di Kecamatan Tabanan, 96 orang (termasuk kepala desa, sekretaris desa, kepala keuangan, kepala pemerintahan, kepala dinas, kepala kesejahteraan, kepala administrasi dan umum, dan kepala perencanaan) mengisi kuesioner di kantor desa masing-masing. Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 1) mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki (54 dari 102 atau 54,2%). Sebanyak 45 responden (46,9%) hanya menyelesaikan sekolah menengah atau sekolah menengah pertama, dan 26 responden (27,1%) hanya menyelesaikan satu sampai lima tahun pengalaman kerja, menurut kriteria penelitian untuk menilai karakteristik responden berdasarkan tahun melayani. Analisis data pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa seluruh indikator pada kompetensi sumber daya manusia (X1), peran perangkat desa (X2), ketersediaan laporan keuangan (X3), dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (Y) memiliki nilai korelasi. , menunjukkan bahwa uji validitas akurat. yang lebih besar dari 0,30 dan oleh karena itu semua indikator dianggap valid. Semua indikator pada variabel kompetensi sumber daya manusia (X1), peran perangkat desa (X2), ketersediaan laporan keuangan (X3), dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) memiliki Cronbach's Alpha >0,70 yang ditunjukkan oleh hasil uji reliabilitas disajikan pada Lampiran 6. Dengan demikian instrumen yang digunakan secara umum dapat dipercaya.

Asimp. Sig (2-tailed) sebesar 0,199 dari uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang diuji memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) memiliki nilai toleransi 0,364 dan nilai VIF 2,749, peran perangkat desa (X2) memiliki nilai toleransi 0,264 dan nilai VIF 3,785, dan aksesibilitas laporan keuangan (X3).) memiliki nilai tolerance 0,365 dan nilai VIF 2,743, sesuai dengan hasil uji multikolinearitas. Memastikan bahwa tidak ada variabel yang memiliki VIF lebih besar dari 10, dan semua variabel memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 (10 persen). Oleh karena itu, tidak ditemukan tanda-tanda multikolinearitas berdasarkan nilai tolerance dan VIF pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai signifikansi uji heteroskedastisitas Glejser menunjukkan bahwa X1 (kompetensi sumber daya manusia) sebesar 0,223, X2 (peran perangkat desa) sebesar 0,518, dan X3 (aksesibilitas laporan keuangan) sebesar 0,339. Hasil uji secara statistik signifikan pada tingkat = 0,05 atau lebih

tinggi. Karena model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas, kesimpulan tersebut berlaku.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,475 + 0,355 X1 + 0,402 X2 + 0,689 X3 + e$$

Uji Simultan (Uji F) menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak, dengan nilai F hitung sebesar 105,225 dan nilai signifikansi Sig 0,000 keduanya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga variabel penjelas berguna dalam memprediksi atau menjelaskan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Artinya akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) dipengaruhi secara signifikan baik secara simultan maupun bersama-sama oleh variabel kompetensi sumber daya manusia (X1), peran perangkat desa (X2), dan aksesibilitas laporan keuangan (X3).

Hasil Uji Koefisien Determinasi, dimana besarnya *adjusted R²* adalah sebesar 0,767. Ini berarti akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel variabel kompetensi sumber daya manusia (X1), peran perangkat desa (X2), dan aksesibilitas laporan keuangan (X3) sebesar 76,7 persen, sedangkan sisanya sebesar 23,3 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model regresi yang digunakan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa ternyata dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistik variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,355 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diterima.

Temuan ini menunjukkan adanya korelasi positif antara kompetensi sumber daya manusia di lembaga pemerintahan desa dengan transparansi pengelolaan keuangannya. Institusi mana pun, betapapun jauhnya, membutuhkan sumber daya manusia untuk bertindak sebagai "mesin" yang mendorongnya menuju tujuannya. Sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan bisnis apa pun. Jika sebuah perusahaan memiliki pekerja yang cakap, ia akan mengalami sedikit kesulitan dalam mencapai tujuannya. Fungsi organisasi dapat terhambat jika sumber daya manusia yang menjalankannya tidak berkualitas.

Teori kepengurusan membantu kita memahami mengapa pegawai negeri terkadang menempatkan kebutuhan lembaga di atas kepentingan mereka sendiri. Sumber daya manusia yang kompeten dan dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum dan melaksanakannya dengan baik untuk kepentingan masyarakat sangat diperlukan peran Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Desa. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dan kemudian memberikan laporan pertanggungjawaban. Kemampuan pemerintah desa untuk menunjukkan bahwa ia telah memenuhi tanggung jawabnya akan bergantung pada keandalan dan keterbukaan laporan pertanggungjawabannya. Kesuksesan setiap perusahaan bergantung pada sumber daya manusianya dan pengetahuan serta keterampilan yang mereka berikan. Sumber daya manusia dianggap kompeten ketika mereka menghasilkan hasil yang diinginkan dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, jika sumber daya manusia di lembaga pemerintahan desa sangat kompeten, maka lembaga tersebut juga akan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan pada tahun 2019, Puspa dkk pada tahun 2020, serta Ramadhan dan Arza pada tahun 2021, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh peran perangkat desa. Nilai t-statistik peran perangkat desa adalah 0,402, dengan tingkat signifikansi 0,000, menunjukkan bahwa nilai ini secara statistik tidak signifikan (yaitu lebih rendah dari $\alpha = 0,05$). Hipotesis kedua dalam penelitian ini bahwa perangkat desa memiliki peran yang signifikan dan berpengaruh dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian dapat diterima.

Membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya dan memajukan misi desa merupakan tanggung jawab perangkat desa. Pengelolaan dana desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel dapat dicapai melalui keterlibatan perangkat desa. Terbukti bahwa perangkat desa di wilayah Kabupaten Tabanan dilibatkan dalam segala aspek pengelolaan dana desa. Skor tertinggi pada item pertanyaan kelima (0,907) dan keenam (0,902) dari uji validitas variabel peran perangkat desa menguatkan pernyataan tersebut, menunjukkan peran aktif perangkat desa dalam memberikan masukan perubahan APBDesa dan berpartisipasi dalam proses administrasi penggunaan dana desa. Menurut Permendagri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perangkat desa bertanggung jawab membantu pengelolaan dana desa tanpa adanya kepala desa. Tanggung jawab ini mencakup seluruh proses manajemen keuangan, mulai dari perencanaan hingga implementasi hingga administrasi hingga pelaporan dan akuntabilitas. Kepercayaan yang lebih besar terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa tergantung pada tingginya tingkat partisipasi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Ramadhan & Arza (2021), Anggraeni et al. (2021), dan Dwiyaniti & Hidajat (2022), yang semuanya menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh peran perangkat desa.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketersediaan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai t-statistik 0,689 untuk variabel independen aksesibilitas laporan keuangan pada tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari ambang batas = 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hal ini terjadi. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat diterima yang menyatakan bahwa ketersediaan laporan keuangan berpengaruh secara substansial dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik termasuk membuat informasi keuangan mudah diakses, seperti laporan tahunan dan audit. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses kepada masyarakat terhadap laporan yang merinci penggunaan dana desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat tergantung pada tersedianya laporan keuangan kepada masyarakat. Badan pemeriksa, masyarakat, dan investor dapat mengawasi bagaimana aset desa digunakan dan kebijakan moneter pemerintah dengan membuat laporan mudah diakses oleh publik. Pengawasan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan desa di Kabupaten Tabanan mudah diakses. Semakin transparan pengelolaan keuangan suatu desa, semakin banyak uang yang dapat dipertanggungjawabkan. Akses ke laporan akuntabilitas yang dapat dipahami dan laporan yang merinci temuan sangat penting untuk akuntabilitas yang efektif. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan tersedia untuk umum. Insentif untuk pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dapat dipicu dengan membuat laporan keuangan mudah diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Menurut studi oleh Indriasih et al. (2022), Kristini dkk. (2020), dan

Sutanto & Hardiningsih (2021), kesediaan penduduk desa untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah mereka atas keputusan pembelanjaan dipengaruhi oleh seberapa mudah mereka mengakses laporan keuangan.

SIMPULAN

Peneliti menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan di lembaga pemerintah desa meningkat sebanding dengan kompetensi sumber daya manusia di lembaga tersebut (berdasarkan hasil pengujian data). Menurut temuan studi, potensi penyelewengan dana desa oleh pejabat dapat dikurangi dengan meningkatkan tingkat partisipasi perangkat desa dalam proses tersebut. Menurut temuan penelitian, memfasilitasi akses pengguna ke laporan keuangan akan mengarah pada pengembangan tanggung jawab atas manajemen fiskal yang sehat. Bagi pemerintah desa diharapkan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam pengelolaan keuangan seperti kompetensi sumber daya manusia, peran perangkat desa dan aksesibilitas laporan keuangan. Pemerintah desa dapat meningkatkan peran atau kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan maupun pemegang jabatan, sehingga dapat digunakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. 267–284.
- Anggraeni, N. P. D., Sumadi, N. K., & Andayani W, R. D. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 386–405.
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Dwiyanti, & Hidajat. (2022). *Pengaruh Peran Perangkat Desa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 4, 1457–1468.
- Ghozali. (2011). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8thed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). *Pengaruh Komitmen Organisasi , Sistem Pengendalian Internal , Kompetensi Pemerintah Desa , Transparansi , dan Aksesibilitas Laporan*. 3(4), 972–981. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>
- Kabarnusa. (2022). *Tabanan Terbaik Ketiga Nasional Penyaluran Dana Desa 2021*. 11 April. <https://kabarnusa.com/tabanan-terbaik-ketiga-nasional-penyaluran-dana-desa-2021/>
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 179–194. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Puspa, Fitri, D., Prasetyo, & Agung, R. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Ramadhan, & Arza. (2021). *Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa*. 3(4), 822–835.
- Sari, Padnyawati, & Yuliantari. (2022). *Pengaruh Kompetensi Sdm, Implementasi Sistem Keuangan Desa, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas*. April, 143–148.
- Septa, & Purwaningrum. (2018). *Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten ponorogo*. <http://eprints.umpo.ac.id/4017/>
- Suci, & Aulia. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 10, 14–25.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 17(1), InPres. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932>
- Umaira, & Adnan. (2019). *Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya)* 1,2. 4(3).
- Wardana. (2021). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kerambitan*. <https://repo.undiksha.ac.id>
- Widyarini, & Wati. (2021). *Pengaruh Sistem Pelaporan, Audit Kinerja, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 152–166.

- Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 95–104. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.22219/jrak.v1i1.497>